

PERANAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI JOMBANG JAWA TIMUR

Sayekti Suindyah Dwiningwarni

sayekti.undar67@gmail.com

Ahmad Zuhdi Amrulloh

Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Darul 'Ulum Jombang

ABSTRACT

The village has an important role in national development, because most of Indonesia's population live in the village. Village funds are intended for the implementation of development and community empowerment. Village funds are prioritized to finance the implementation of local scale village programs and activities in the field of village development and empowerment. The purpose of this study was to analyze the effect of physical development and empowerment on BUMDes; the influence of BUMDes and physical development on community income; the effect of the empowerment program on community income. This study uses a cross sectional approach. The sampling technique is done by simple random sampling, the analysis used is Multiple Linear Regression Analysis with Natural Logarithms. The results showed that physical development and empowerment can increase the role of BUMDes, BUMDes increase community income, physical development does not cause an increase in community income, empowerment programs can increase community income. This means that planning for village fund management should be directed at empowerment programs through BUMDes to increase community income. And this also proves that BUMDes are very much needed by the village community.

Key words: physical development; empowerment program; village-owned enterprises; community revenue

ABSTRAK

Desa mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di desa. Dana desa diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan dan pemberdayaan desa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pembangunan fisik dan pemberdayaan terhadap BUMDes; pengaruh BUMDes dan pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat; pengaruh program pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional*. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *simple random sampling*, analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan Logaritma Natural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan pemberdayaan dapat meningkatkan peranan BUMDes, BUMDes meningkatkan pendapatan masyarakat, pembangunan fisik tidak menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat, program pemberdayaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini berarti bahwa perencanaan pengelolaan dana desa sebaiknya diarahkan pada program pemberdayaan melalui BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan ini juga membuktikan bahwa BUMDes keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang berupa pembangunan fisik tidak menyentuh pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Kata kunci: pembangunan fisik; program pemberdayaan; badan usaha milik desa; pendapatan masyarakat.

PENDAHULUAN

UU Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa yang disebut dengan

desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014).

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota.

Desa merupakan basis pengidentifikasian permasalahan sebuah wilayah guna usulan perencanaan sebuah wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah akan dapat terwujud dan sesuai dengan target, jika ada dukungan dan stimulus dari penduduk desa setempat (Sidik, 2015).

Dalam menjalankan pemerintahan desa menggunakan dana APBDesa, untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan (Nugrahaningsih dan Winarna, 2016). Pada saat pemerintahan desa melakukan perencanaan dan penganggaran, maka pemerintahan desa harus melibatkan masyarakat, dalam hal ini di-representasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuan dari pelibatan masyarakat desa dalam perencanaan dan penganggaran adalah agar program kerja dan kegiatan yang disusun mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam pasal 4 Permendes RI Nomor 21 tahun 2015 disebutkan bahwa dana desa dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas dana desa adalah digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di lokal desa, di bidang pembangunan fisik desa dan pemberdayaan desa. Program pembangunan fisik desa berupa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infra-

struktur, kewirausahaan masyarakat mandiri, sarana dan prasarana produksi dan distribusi, energi terbarukan, pelestarian lingkungan hidup. Program pemberdayaan masyarakat antara lain berupa kegiatan yang dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam rangka pengembangan kewirausahaan, peningkatan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi masyarakat desa baik secara individu maupun kelompok.

Sasaran dari pengelolaan dana desa, antar lain: 1) untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat desa, 2) memperbaiki kehidupan segi sosial, budaya dan politik masyarakat desa. Keberhasilan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari jumlah atau angka partisipasi dari masyarakat desa setempat. Pengelolaan dana desa diusulkan dalam musyawarah desa, begitu juga dengan penggunaan dana desa untuk dimasukkan dalam APBDesa. Dana desa dapat dikelola dan digunakan di luar perencanaan yang telah disepakati dalam musyawarah desa setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati. Tata cara penggunaan dan pengelolaan dana desa di luar hasil musyawarah desa tersebut diatur dalam PMK Nomor 93/PMK_07/2015 (Kementerian Keuangan, 2015).

Pemerintah melalui pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintah desa telah melakukan pengembangan sektor ekonomi di pedesaan melalui berbagai program pemberdayaan yang dicanangkan oleh beberapa kementerian. Tetapi kebijakan pemerintah ini belum maksimal hasilnya, salah satu penyebabnya adalah adanya intervensi pemerintah pusat terlalu besar terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa, sehingga masyarakat desa tidak memiliki kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi untuk pengembangan desanya. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya penurunan kondisi ekonomi di pedesaan, dan ini akan menyebabkan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah, sehingga akan menurunkan semangat kemandirian masyarakat desa untuk

berusaha (Putra, 2015). Sebuah pendekatan baru yang pernah dijalankan dan diharapkan mampu mendorong dan membangkitkan kondisi ekonomi di desa memberikan usulan yaitu adanya pendirian instansi atau lembaga baru yang dimiliki dan dikelola oleh desa. Instansi atau lembaga ini didirikan atas dasar keinginan dan kebutuhan masyarakat desa. Keinginan dan kebutuhan masyarakat desa ini ditunjukkan dengan potensi desa yang ada dan dikelola dengan tepat. Sumber-sumber daya dimiliki dan dikelola desa dengan tepat ini akan menyebabkan munculnya permintaan di pasar. Instansi atau lembaga yang terbentuk ini supaya tidak dikuasai pemilik modal besar di pedesaan, maka diusulkan lembaga tersebut dimiliki dan dikelola oleh desa serta dikontrol secara bersama. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat (Budiono, 2015).

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui Kementerian Desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan Keuangan Desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu pendirian BUMDes ini juga menjalankan amanat UU Nomer 12 Tahun 2008 perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes ini didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari pendirian BUMDes ini adalah sebuah upaya penguatan kapasitas atau kemampuan masyarakat desa yang didukung oleh kebijakan pemerintah kabupaten atau kota. Kebijakan pemerintah kabupaten atau kota ini diwujudkan dalam bentuk fasilitasi dan perlindungan usaha BUMDes dari ancaman dan tekanan persaingan para pemodal besar (Atmojo *et al.*, 2017).

Realisasi terbentuknya BUMDes, juga tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengeluarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 87 UU Nomer 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Harmiati dan Zulfakim, 2018).

BUMDes ini adalah sebuah instansi atau lembaga baru yang berada di pedesaan dan dikelola oleh desa. BUMDes dalam operasionalisasinya dibantu dan didukung oleh lembaga keuangan desa atau unit pembiayaan desa. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan didukung dengan seperangkat aturan yang layak, maka akan dapat menghasilkan sebuah angka pertumbuhan ekonomi yang baik. Apalagi pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan pendapatan atau penghasilan ini akan mampu mengatasi permasalahan ekonomi di desa. Tercapainya angka pertumbuhan ekonomi yang baik memerlukan langkah-langkah secara strategi dan praktis untuk menyatukan kemampuan desa, kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, permintaan pasar, rancangan instansi atau lembaga ke dalam sebuah perencanaan. Selain itu, perlu juga memperhatikan potensi lokalistik dan dukungan aturan (*good will*) dari pemerintah kabupaten atau kota atau pemerintah provinsi untuk mengatasi menurunnya keuntungan atau kelebihan dari kegiatan ekonomi desa yang disebabkan oleh kemungkinan tidak berjalannya perekonomian di pedesaan.

Sehingga terjadi adanya penyatuan antara sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga (Hardijono *et al.*, 2014). BUMDes dalam menjalankan usahanya harus memegang prinsip ekonomis. Masing-masing desa memiliki keleluasan dalam membentuk BUMDes. Jenis atau bentuk BUMDes ini disesuaikan dengan ciri-ciri desa atau lokal, keunggulan atau potensi, dan *resources* yang tersedia di masing-masing desa. Pengaturan tentang BUMDes diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), tujuan pendirian ini telah tercantum dalam UU No.32 tahun 2004. Tetapi pendirian BUMDes ini atas ide atau prakarsa masyarakat yang didasarkan pada kemampuan desa dan kearifan desa setempat. Pemerintah memiliki tugas dan peran untuk melaksanakan kegiatan pengenalan atau sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa tentang keberadaan BUMDes. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota. Dengan sosialisasi ini diharapkan pemerintah desa dapat mendorong, meniadakan dan mempersiapkan masyarakat untuk membangun kehidupannya sendiri. Tugas Pemerintah adalah memberikan fasilitas dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa yang dipersiapkan untuk pendirian BUMDes. Pengelolaan dana desa yang tepat sasaran dan sesuai dengan target yang akan dicapai sangat diperlukan, selain itu pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan profesional.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan variabel yang lebih nyata dalam sektor pembangunan masyarakat desa, dengan menambahkan beberapa indikator pengukuran. Kedua, penelitian ini menggunakan BUMDes sebagai variabel intervensi. Ketiga, penelitian ini mengaitkan antara pembangunan fisik, pemberdayaan

terhadap pendapatan masyarakat yang produktif secara menyeluruh, ini berbeda dengan penelitian (Agunggunanto *et al.*, 2016; Nugrahaningsih dan Winarna, 2016).

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: bagaimanana pengaruh pembangunan fisik dan pemberdayaan terhadap BUMDes; pengaruh BUMDes dan pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat; pengaruh program pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembangunan fisik dan pemberdayaan terhadap BUMDes; pengaruh BUMDes dan pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat; pengaruh program pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan karena sejak UU tentang Desa diundangkan dan diturunkannya dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui BUMDesa masih belum tampak capaiannya secara menyeluruh di Jawa Timur khususnya Jombang dan hasil penelitian ini juga penting untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan tentang masih diperlukannya dana desa atau tidak bagi seluruh desa di Indonesia pada umumnya.

TINJAUAN TEORETIS

New Public Management

Penelitian ini berkaitan dengan dana desa dan pengelolaannya. Salah satu teori yang mendasari penelitian ini adalah *New Public Management* (NPM). NPM adalah suatu sistem manajemen desentralisasi dengan perangkat manajemen baru misalnya *controlling*, *benchmarking* dan *lean management* (Denhardt, 2000). NPM berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi kinerja. Konsekuensi yang diterima oleh pemerintah dengan mengimplementasikan NPM adalah melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, kompetensi tender (lelang terbuka). Implementasi dari NPM ini membawa perubahan terhadap manajemen sektor publik tradisional yang bersifat

birokratis, kaku dan hierarkis menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan mengakomodir pasar. Perubahan ini bukan hanya perubahan kecil, tetapi perubahan ini telah merubah peran pemerintah khususnya dalam hal hubungan pemerintah dengan masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Prinsip NPM antara lain (1) fokus pada manajemen; (2) memiliki standar yang jelas dan ada pengukuran kinerja yang dicapai; (3) penekanan pada hasil bukan pada prosedur; (4) pergeseran ke arah persaingan yang lebih besar dalam pelayanan sektor publik; (5) penekanan pada pola pengembangan manajemen yang digunakan oleh sektor swasta ke dalam sektor publik; (6) pergeseran ke arah pemecahan ke dalam organisasi yang lebih kecil dalam sektor pelayanan publik; (7) penekanan lebih besar pada disiplin dan parsimony dalam penggunaan Sumber Daya (Hood, 1991).

Teori NPM digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengimplementasikan transparansi penggunaan dana desa dan mengukur kinerja pemerintahan desa dari sisi output yang dihasilkan dalam penggunaan dana desa. Pemerintah desa adalah penerima dan pelaksana mandat dari masyarakat yang dihasilkan dari Musyawarah desa dan Musrebang. Keputusan yang diambil dari Musdes dan Musrebang dapat berupa RPJM dan RKP desa. RPJM dan RKP ini yang akan dituangkan dalam APBDesa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di desa.

Dana Desa

Definisi menurut UU Nomer 6 Tahun 2014, yang disebut dana desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN dan dialokasikan setiap tahun sekali. Dana desa ini dipergunakan untuk desa dan dikirim melalui APBD Kabupaten atau Kota setiap tahun. Dana desa ini dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang kewenangannya ada di desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala prioritas desa. Skala prioritas untuk penggunaan dana desa diatur melalui Permendes (Undang-Undang

No. 6 Tahun 2014; Nugrahaningsih dan Winarna, 2016). Ada 6 (enam) sumber anggaran Desa, yaitu: 1) PADesa, 2) ADD, 3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD), 4) Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah), 5) Hibah Pihak Ketiga, serta 6) Pendapatan lain-lain yang sah yang bersumber dari APBD. Sedangkan yang disebut dengan keuangan desa adalah seluruh keuangan yang diterima oleh desa baik yang bersumber dari APBD dan kas desa atau pendapatan lain-lain desa. Keuangan desa dikelola oleh TPTPK Desa. Dana desa ini digunakan untuk pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini untuk membantu memberikan arah atau petunjuk, batasan dan panduan atau pedoman bagi Desa (Sidik, 2015; Agunggunanto *et al.*, 2016; Purnamasari *et al.*, 2016).

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21/2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 jo. PP No.47/2014, hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini untuk membantu memberikan arah atau petunjuk, batasan dan panduan atau pedoman bagi Desa (Purnamasari *et al.*, 2016).

Jenis-Jenis Pembangunan Desa Pembangunan Fisik

Jenis-Jenis pembangunan desa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh sebuah negara, bangsa dan pemerintah, dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Perubahan ini identik atau hampir sama dengan adanya perubahan wujud atau bentuk dari pembangunan fisik desa. Misalnya pembangunan masjid, jalan, sarana perumahan, sarana pendidikan, lapangan

terbang, dan sarana umum (Sofiyanto *et al.*, 2017). Pembangunan gedung, jalan, sarana pendidikan dan lain-lain atau yang disebut dengan pembangunan fisik dijalankan untuk masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat (Non Fisik)

Pemberdayaan masyarakat adalah cara-cara atau metode untuk membangun dan mengembangkan jiwa mandiri dan kemakmuran masyarakat. Program pemberdayaan ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan, yaitu: untuk meningkatkan iptek, etika, moral, skill, attitude, kesadaran diri, kemampuan, dan pemanfaatan *resources* yang ada di desa.

Indikator pengukuran yang dapat digunakan masyarakat untuk melihat keberhasilan dari program pemberdayaan, antara lain: 1) Kehadiran warga dalam setiap kegiatan, 2) Jumlah kehadiran setiap warga, 3) Penyelenggaraan program yang dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat. 4) Jumlah usulan atau gagasan atau ide yang dimunculkan oleh masyarakat. 5) Masyarakat memberikan bantuan dana untuk pelaksanaan program kegiatan dengan sukarela, 6) Jumlah kegiatan yang dilaksanakan petugas dalam penyelesaian masalah. 7) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan. 8) Menurunnya jumlah orang sakit. 9) Peningkatan respon penduduk terhadap cara hidup sehat, 10) Kemandirian masyarakat tentang kesehatan semakin meningkat (Irawati dan Martanti, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan pendirian BUMDes antara lain: 1) untuk me-

ningkatkan PADesa, 2) Peningkatan perekonomian keluarga dan masyarakat, 3) Mampu memberikan sumbangan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, 4) Menghambat berkembangnya sistem ekonomi kapitalis (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014).

Karakteristik BUMDes yaitu: 1) dimiliki dan dikelola oleh desa, 2) Modal usaha dan modal kerja bersumber dari dana desa (51%) dan masyarakat (49%) dengan cara sebagai pemodal, 3) Pengelolannya berdasarkan *local wisdom*, 4) Laba yang diperoleh digunakan untuk mengembangkan usaha masyarakat dan desa, 5) Bergerak di bidang usaha yang memperhatikan keunggulan desa dan informasi tentang pasar, 6) Keberadaannya difasilitasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. 7) Pengawasan dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD dan anggota (Agunggunanto *et al.*, 2016; Irawati dan Martanti, 2018; Chikmawati, 2019).

Prinsip Pengelolaan BUMDes

Manajemen dalam pengelolaan BUMDes perlu dilakukan elaborasi untuk dapat dimengerti oleh seluruh elemen pemerintahan desa, BPD, Pemerintahan Kabupaten atau Kota dan masyarakat. Dalam pengelolaan BUMDes, maka pengelola diwajibkan untuk memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 1) *Kooperatif*, 2) *Partisipatif*, 3) *Emansipatif*. 4) *Transparan*. 5) *Akuntabel*. 6) *Sustainable* (Nugrahaningsih dan Winarna, 2016; Atmojo *et al.*, 2017).

Terkait dengan penerapan Dana Desa, yang dikelola BUMDes dan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan, diharapkan akan lebih berdaya guna dan mandiri. Pengelolaan dan penggunaan dana desa oleh BUMDes akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau keluarga dari berusaha atau bekerja. Ada beberapa

macam pekerjaan masyarakat, antara lain: petani, peternak, pedagang, nelayan, buruh, dan yang bekerja disektor pemerintah dan swasta (Ramadana, 2013; Irawati dan Martanti, 2018; Fanani, 2019). Pengertian lain dari pendapatan adalah balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga serta keuntungan atau profit (Hendrik, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan pendapatan masyarakat adalah hasil yang diterima individual maupun rumah tangga yang berupa upah atau gaji dalam waktu tertentu.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh individu maupun instansi atau lembaga ataupun masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) usia, 2) tingkat pendidikan, 3) pengalaman, 4) modal kerja, 5) Produktivitas atau jam kerja, dan 6) faktor lainnya. Pencari kerja dalam memasuki pasar kerja selalu menghadapi dengan faktor-faktor tersebut di atas (Pertiwi, 2015).

Pendapatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, tingkat kesejahteraannya juga semakin tinggi. Pendapatan keluarga secara umum bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kepala keluarga, pekerjaan kepala keluarga, umur kepala keluarga, jumlah anggota rumah tangga, aset yang dimiliki rumah tangga dan lain sebagainya. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan. Faktor-faktor tersebut adalah: 1) Usia, 2) Karakteristik atau karakter bawaan, 3) Ketidapastian dan variasi pendapatan. 4) Bobot latihan, 5) Kekayaan warisan, 6) Ketidaksempurnaan pasar, 7) Diskriminasi (Modigliani dan Miller, 1958).

Penelitian Terdahulu

Caya dan Rahayu (2019) melakukan penelitian dengan hasil bahwa BUMDes

memberikan dampak pada perekonomian desa, pengembangan usaha masyarakat desa dan memotivasi masyarakat desa untuk memulai usaha baru. Kurniawan (2016) membuktikan bahwa BUMDes memiliki peran untuk meningkatkan PADesa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator. Peran BUMDes tersebut mengalami peningkatan. Selain itu, BUMDes Desa Lanjut telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan atau pedoman BUMDes tersebut, tetapi tidak sesuai dengan yang di inginkan, namun hanya memberikan peningkatan yang kecil, dan peningkatan ini dikatakan belum signifikan dengan yang diharapkan.

Rahman (2015) membuktikan bahwa perekonomian masyarakat terjadi peningkatan terjadi pada masyarakat yang menggunakan dana BUMDes yang melakukan kegiatan dagang gorengan, menjual barang pecah belah, menjual barang-barang kelontong, perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Tetapi untuk masyarakat yang bekerja di perkebunan karet kondisi perekonomiannya tetap atau stagnan.

Anggraeni (2016) membuktikan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri dapat membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial, tetapi disisi lain keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.

Boonperm *et al.*, (2013) membuktikan bahwa VF (*Thailand Village and Urban Community Fund*) Pinjaman adalah terkait dengan perolehan dari barang yang lebih tahan lama. VF adalah program dari pemerintah Thailand untuk masyarakat pedesaan dengan memberikan bantuan pinjaman modal kerja melalui kredit bergulir.

Dengan cara yang berlawanan, pinjaman dari Bank untuk sektor pertanian dan Koperasi Pertanian muncul memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pendapatan dari pada terhadap pengeluaran. Itu

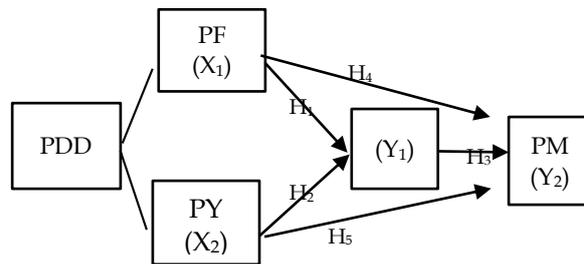
bukti juga menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran (atau pendapatan) dari VF peminjaman adalah sangat kuat pada kuantil yang rendah dan mengalir tidak proporsional untuk rumah tangga berpenghasilan rendah; ini yang disebut dengan “Pro-poor”. Lalira *et al.*, (2018) melakukan penelitian dengan hasil bahwa dana desa dan pengalokasian dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.

Fanani (2019) melakukan penelitian dengan hasil penelitian menunjukkan faktor legitimasi politik berpengaruh terhadap motivasi kepala desa, karakteristik desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam penganggaran di desa. Faktor gaya kepemimpinan, legitimasi politik, dan akses informasi, tidak berpengaruh terhadap motivasi kepala desa. Faktor gaya kepemimpinan, legitimasi politik, dan akses informasi, dan motivasi kepala desa tidak berpengaruh partisipasi masyarakat dalam penganggaran di desa. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran berpengaruh terhadap pendapatan asli desa.

Purnamasari *et al.*, (2016) berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti melihat bahwa pencapaian tujuan dalam efektivitas pengelolaan BUMDesa berbasis ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Atmojo *et al.*, (2017) melakukan penelitian dengan hasil penelitian bahwa penggunaan alokasi dana desa efektif untuk mengembangkan potensi ekonomi. Kedua, Desa Bangunjiwo menyediakan pelatihan khusus untuk kegiatan masyarakat dalam rangka mendorong tumbuhnya potensi ekonomi.

Terakhir, potensi ekonomi utama Desa Bangunjiwo disebut “Kajigelem”. Dengan demikian penggunaan alokasi dana desa akan dapat lebih efektif untuk mengembangkan potensi ekonomi, jika diimbangi dengan pemberian pelatihan bagi para perangkat desa atau warga desa yang terlibat dalam pengalokasian dana desa.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Keterangan:

- PDD : Pengelolaan Dana Desa
- PF : Pembangunan Fisik (X₁)
- PY : Pemberdayaan (X₂)
- Y₁ : BUMDes
- PM : Pendapatan Masyarakat (Y₂)

Hipotesis

- H₁ : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pembangunan fisik terhadap BUMDes.
- H₂ : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pemberdayaan terhadap BUMDes
- H₃ : Ada pengaruh positif dan signifikan antara BUMDes terhadap pendapatan masyarakat.
- H₄ : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat
- H₅ : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *cross sectional* yaitu pengamatan hanya dilakukan sekali sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peneliti dengan melihat adanya hubungan antara variabel dependen dan independen.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah masyarakat desa di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang yang dalam usia produktif. Masyarakat usia produktif adalah masyarakat yang berusia antara 15–55 tahun. Jumlah populasi sebanyak 1.999 orang. Sampel penelitian ini sebanyak 10% dari populasi (Arikunto, 2010), yaitu sebanyak 200 orang.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *simple random sampling* dari populasi yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik berikut:

1. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mendokumentasikan data-data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Data tersebut berupa data penduduk yang berusia produktif, data pembangunan fisik, data pemberdayaan, data BUMDes, data Dana Desa, penyaluran Dana Desa dan dokumen lain yang diperlukan.
2. Kuesioner, yaitu sebuah daftar yang berisi pernyataan-pernyataan yang diisi oleh responden dengan cara memilih jawaban yang telah disediakan. Kuesioner ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian (Sugiyono, 2012).
3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai stakeholder di pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten.

Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (X), terdiri dari:
Variabel X_1 : Pembangunan Fisik
Variabel X_2 : Pemberdayaan
2. Variabel Intervening (Y_1), yaitu : BUMDes
3. Variabel Tergantung (Y_2), yaitu: Pendapatan Masyarakat

Definisi Operasional Variabel

1. Pembangunan Fisik (X_1): pembangunan yang terjadi di masyarakat desa yang

bersumber dari Dana Desa dan yang dikerjakan oleh masyarakat desa serta digunakan untuk masyarakat desa (ordinal).

2. Pemberdayaan (X_2), yaitu: program pemberdayaan masyarakat desa yang berasal dari Dana Desa dan dikerjakan oleh masyarakat desa (ordinal).
3. BUMDes (Y_1), yaitu: Badan Usaha Masyarakat Desa yang modal kerjanya dan modal penyertaannya berasal dari dana desa dan bertugas untuk mengelola dana desa (ordinal).
4. Pendapatan Masyarakat (Y_2), yaitu: hasil atau pendapatan yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga yang berasal dari pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes (ordinal).

Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan data ordinal dalam pengumpulan data melalui pengisian kuesioner.

Untuk mengkuantitatifkan data ordinal tersebut, maka digunakan skala pengukuran Likert. Pengukuran skala Likert yang digunakan dengan kriteria berikut:

Sangat Setuju	: 5
Setuju	: 4
Ragu-Ragu	: 3
Tidak Setuju	: 2
Sangat Tidak Setuju	: 1

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear dengan Standardize dengan rumus berikut:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \varepsilon_1 \quad (1)$$

$$Y_1 = \beta_2 X_2 + \varepsilon_1 \quad (2)$$

$$Y_2 = \beta_3 Y_1 + \varepsilon_2 \quad (3)$$

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \varepsilon_3 \quad (4)$$

$$Y_2 = \beta_5 X_2 + \varepsilon_4 \quad (5)$$

Keterangan:

X_1 : Pembangunan Fisik

X_2 : Pemberdayaan

Y_1 : BUMDes

Y_2 : Pendapatan Masyarakat

β_i : koefisien path

Ln : Logaritma Natural

ε_i : standat error

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh positif dan signifikan Pembangunan Fisik terhadap BUMDes.
2. Pengaruh positif dan signifikan Program Pemberdayaan terhadap BUMDes.
3. Pengaruh positif dan signifikan BUMDes terhadap pendapatan masyarakat
4. Pengaruh positif dan signifikan Pembangunan Fisik terhadap pendapatan masyarakat.
5. Pengaruh positif dan signifikan Program Pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 200 eksemplar. Dari 200 eksemplar tersebut semuanya kembali, karena setiap responden didatangi untuk mengisi kuesioner. Setelah kuesioner terisi diserahkan kembali kepada petugas. Selain itu juga menggunakan data sekunder tentang jumlah dana desa yang diterima dan pengalokasiannya serta data jumlah BUMDesa.

Dari pengumpulan kuesioner yang telah diisi oleh responden dapat ditabulasi data tentang pengelompokan responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Pengelompokan responden adalah sebagai berikut:

Pengelompokan Responden berdasarkan Usia

Responden yang dikelompokkan berdasarkan usia, tampak pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Kelompok Responden berdasarkan Usia

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
----	------	-----------	----------------

1	<20 tahun	12	6,00
2	21-30 tahun	65	32,5
3	31-40 tahun	78	39,0
4	41-50 tahun	45	22,5
	Jumlah	200	100

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 200 orang responden sebagian yang berusia produktif, berada diantara usia 21-50 tahun. Ini menunjukkan bahwa usia responden sudah layak untuk dijadikan responden.

Pengelompokan Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Pengelompokan data responden berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 115 orang dari 200 orang atau sebesar 57,2%. Ini tampak pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Kelompok Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	115	57,5
2	Perempuan	85	42,5
	Jumlah	200	100

Sumber: Data Primer diolah, 2018.

Pengelompokan Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Lapangan Usaha

Data pengelompokan responden berdasarkan jenis pekerjaan dan lapangan usaha tampak pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Kelompok Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Petani	82	41,0
2	Pegawai Negeri	3	1,5
3	Pedagang	60	30,0
4	Peternak	54	27,5
	Jumlah	200	100

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian responden bekerja sebagai petani (41%), pedagang (30%), dan peternak (27,5%).

Pengelompokan Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data pengelompokan responden berdasarkan tingkat pendidikan, yang dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah mengenyam pendidikan SD/tamat SD (43%), SMP (34,5%), SMA (17%) dan sebagian ada yang lulusan Sarjana (5,50%). Data ini tampak pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Kelompok Responden berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	86	43,0
2	SMP	69	34,5
3	SMA	34	17,0
4	S1	11	5,50
	Jumlah	200	100

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Pengelompokan Responden Berdasarkan Pendapatan

Data responden yang dikelompokkan berdasarkan pada besar pendapatan yang diterima oleh responden selama satu bulan. Sebagian besar responden masih berpendapatan kurang dari Rp 1 juta (81,5%), ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih dalam kondisi kekurangan atau miskin, dan hanya sebanyak 8,5% responden yang berpendapatan lebih dari Rp 2 juta, sedangkan 30% responden berpendapatan antara Rp 1 juta sampai dengan Rp 2 juta. Data responden ini, tampak pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Kelompok Responden berdasarkan Pendapatan

No	Pendapatan	Frekuensi	Persentase (%)
1	< Rp 1 juta	123	81,5
2	Rp 1 juta - Rp 2 juta	60	30,0
3	>Rp 2 juta	17	8,5
	Jumlah	200	100

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Uji Reliabilitas

Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas ini adalah metode *Cronbach alpha* (r alpha) ditunjukkan oleh besarnya nilai *alpha* (α). Pengambilan keputusan reliabilitas suatu variabel ditentukan dengan membandingkan nilai r alpha dengan nilai r tabel, apabila r alpha $>$ 0,6 maka variabel yang diteliti adalah reliabel. Hasil uji realibilitas instrumen tampak pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Nilai Cronbach alpha	Nilai r tabel	Kesimpulan
X ₁	0,874	0,6	Reliable
X ₂	0,875	0,6	Reliable
Y ₁	0,899	0,6	Reliable
Y ₂	0,825	0,6	Reliable

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan adalah reliabel, artinya bisa digunakan dalam pengumpulan data.

Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *product moment person*. Suatu variabel dikatakan valid apabila nilai korelasi yang dihasilkan $>$ dari nilai kritis (r tabel) atau p value $<$ $sig = 0,05$. Hasil uji validitas instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data tampak pada Tabel 7. Tabel 7 menunjukkan bahwa uji validitas terhadap instrumen yang digunakan dalam penelitian dihasilkan bahwa instrumen tersebut untuk keempat variabel penelitian adalah valid.

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Var	No. Item	Koefisien Korelasi	r tabel	Kesimpulan
X ₁	1.	0,938	0,444	Valid
	2.	0,858	0,444	Valid
	3.	0,900	0,444	Valid

	4.	0,870	0,444	Valid
	5.	0,495	0,444	Valid
X ₂	1.	0,854	0,444	Valid
	2.	0,823	0,444	Valid
	3.	0,692	0,444	Valid
	4.	0,925	0,444	Valid
	5.	0,851	0,444	Valid
	6.	0,581	0,444	Valid
Y ₁	1.	0,939	0,444	Valid
	2.	0,886	0,444	Valid
	3.	0,926	0,444	Valid
Y ₂	1.	0,887	0,444	Valid
	2.	0,836	0,444	Valid
	3.	0,874	0,444	Valid

Sumber: data primer diolah, 2018

Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda antara variabel X₁ terhadap Y₁, tampak pada Tabel 8.

Tabel 8
Koefisien Regresi Variabel X₁ dan Y₁

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
		Beta				
1	(Constant)	8.77	.867		10.12	.00
	X ₁	.059	.053	.080	1.13	.26

a. Dependent Variable: BUMDes

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Tabel 8 menjelaskan bahwa pengaruh X₁ terhadap Y₁ adalah positif tetapi tidak signifikan. Ini berarti bahwa jika ada kenaikan pembangunan fisik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kinerja BUMDes sebesar 0,080 satuan dengan syarat X₂ tetap, tetapi pengaruh ini tidak signifikan, artinya kecil pengaruhnya. Karena kecil pengaruhnya, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan fisik tidak berpengaruh terhadap keberadaan BUMDes.

Ada atau tidak ada BUMDes, maka pembangunan fisik tetap dianggarkan dan dilaksanakan. Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda antara X₂ terhadap Y₁, tampak pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9
Koefisien Regresi Variabel X₂ dan Y₁

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
		Beta				
1	(Constant)	3.3	.989		3.371	.001
	X ₂	.32	.049	.420	6.518	.000

a. Dependent Variable: BUMDes

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Tabel 9 menunjukkan bahwa pengaruh X₂ terhadap Y₁ adalah positif dan signifikan. Ini berarti bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilaksanakan melalui BUMDes. Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda antara variabel Y₁ terhadap Y₂, tampak pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10
Koefisien Regresi Variabel Y₁ dan Y₂

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
		Beta				
1	Constant	7.734	.611		12.66	.00
	Y ₁	.165	.062	.187	2.683	.01

a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Tabel 10 menunjukkan bahwa Y₁ berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y₂. Ini berarti bahwa BUMDes keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dengan adanya BUMDes pendapatan masyarakat dapat meningkat. Hasil perhitungan analisis regresi linier antara X₁ terhadap Y₂, tampak pada Tabel 11.

Tabel 11 menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara X₁ terhadap Y₂, tetapi tidak signifikan. Ini berarti bahwa, program pembangunan fisik belum menyentuh masyarakat, karena belum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 11
Koefisien Regresi Variabel X₁ dan Y₂

Coefficients ^a						
Model		Unstandar dized Coefficient		Standar dized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.904	.768		11.60	.000
	X ₁	.027	.047	.041	.581	.562

a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat
Sumber: Data Primer diolah, 2018

Hasil perhitungan analisis regresi linier antara X₂ terhadap Y₂ tampak pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12
Koefisien Regresi Variabel X₂ dan Y₂

Coefficients ^a						
Model		Unstandar dized Coefficient		Standar dized Coefficient	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	Constan	8.432	.961		8.77	.00
	X	.046	.048	.068	.96	.34

a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat
Sumber: Data Primer diolah, 2018

Tabel 12 menunjukkan bahwa X₂ berpengaruh positif terhadap (Y₂), tetapi tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa walaupun ada program pemberdayaan masyarakat tetapi program tersebut belum dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat, ini dibuktikan dengan hasil pada Tabel 12 di atas.

Dana Desa

Jumlah Dana Desa yang diterimakan ke masing-masing Desa berbeda antara desa satu dengan yang lainnya, hal ini berdasarkan pada Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula di masing-masing desa. Alokasi Dasar (AD) adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

Alokasi Afirmasi (AA) adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Alokasi Formula (AF) adalah alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran DD di seluruh Desa di Jombang sudah ditentukan dengan Peraturan Bupati. Alokasi masing-masing Desa juga sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebagian besar desa di kecamatan Wonosalam berstatus desa tertinggal, hanya ada satu desa yang berstatus desa berkembang, yaitu desa Panglungan. Untuk desa yang tertinggal akan menerima DD yang lebih besar dibandingkan dengan desa yang lain, karena ada Alokasi Afirmasi yang diterima sebagai tambahan. Penyaluran DD tampak pada Tabel 13 berikut:

Tabel 13
Penyaluran Dana Desa Tahun 2015,2016, 2017
(dalam juta rupiah)

Desa	Bangdes	Daya	Residu
Panglungan	53,453	16,160	30,386
Sumberejo	59,997	8,102	31,901
Wonokerto	57,458	13,866	28,676
Carangwulung	38,438	13,496	48,066
Wonosalam	59,897	9,172	30,931
Sambirejo	59,704	11,188	29,109
Jarak	59,815	14,832	25,353
Wonomerto	36,683	20,977	42,341
Galengdowo	57,000	16,103	26,897
Total	100,000	100,000	100,000

Sumber : Data sekunder diolah, 2018

Tabel 13 menunjukkan bahwa penyaluran Dana Desa dari tahun 2016 - 2018 mengalami peningkatan berdasarkan pada AD, AA dan AF. Desa Sambirejo penerima DD terbesar pada tahun 2018, karena desa tersebut adalah desa dengan status tertinggal dan memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di kecamatan Wonosalam.

Realisasi Penggunaan Dana Desa

Dana Desa yang disalurkan kemasing-masing desa dialokasikan sesuai dengan aturan bahwa 90% Alokasi Dasar dan 10% Alokasi Formula. Aturan ini berlaku untuk pengalokasian DD tahun 2017. Pengalokasian DD ini sebenarnya juga tidak terlepas dari status desa tersebut, yaitu maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.

Tabel 14
Realisasi Pengalokasian Dana Desa
Tahun 2017 (%)

Desa	Bangdes	Daya	Residu
Panglungan	53,453	16,160	30,386
Sumberejo	59,997	8,102	31,901
Wonokerto	57,458	13,866	28,676
Carangwulung	38,438	13,496	48,066
Wonosalam	59,897	9,172	30,931
Sambirejo	59,704	11,188	29,109
Jarak	59,815	14,832	25,353
Wonomerto	36,683	20,977	42,341
Galengdowo	57,000	16,103	26,897
Total	100,000	100,000	100,000

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Keterangan:

Bangdes : Pembangunan Fisik
Daya : Pemberdayaan
Residu : Sisa (DD-Bangdes-Daya)

Tabel 14 menunjukkan bahwa sebagian besar Dana Desa yang diterima oleh desa masih digunakan untuk pembangunan fisik di Desa tersebut, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan masih ada bagian yang tidak digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan (residu). Harusnya, jika mengikuti UU Desa no 6 tahun 2004, pengalokasian DD tidak boleh ada sisa (residu). Pengalokasian dana desa untuk pembangunan fisik dilakukan melalui BUMDes. Jumlah BUMDes sebanyak 9 (sembilan) buah.

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini memiliki 5 (lima) hipotesis. Hasil perhitungan uji parsial (*t test*) tampak terhadap hipotesis 1 sampai dengan 5 tampak pada Tabel 15 berikut:

Tabel 15
Hasil Uji Parsial (T test)

Variabel Dependen	Variabel Independen	T test	Signifikasi
Y1	X1	1.127	0,261
Y1	X2	6.518	0,000
Y2	Y1	2.683	0,008
Y2	X1	0.581	0,562
Y2	X2	0.956	0,340

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan nilai koefisien determinasi dan korelasi untuk kelima hipotesis tampak pada Tabel 16 berikut:

Tabel 16
Koefisien Determinasi dan Korelasi

Variabel Dependen	Variabel Independen	R	R square	Adjusted R Square
Y1	X1	0,080	0,006	0,001
Y1	X2	0,420	0,177	0,173
Y2	Y1	0,187	0,035	0,030
Y2	X1	0,041	0,002	-0,003
Y2	X2	0,068	0,005	0,000

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Tabel 16 menunjukkan bahwa koefisien determinasi untuk masing-masing hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Ternyata dari 5 hipotesis yang diajukan tak satu pun yang memberikan hasil perhitungan koefisien determinasi yang baik, karena semua nilai yang dihasilkan memiliki angka kurang dari 50%. Sehingga dapat dikatakan bahwa model tersebut tidak baik. Karena koefisien determinasi itu adalah menunjukkan keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut. Jika nilai koefisien determinasi 75% ke atas, maka model tersebut dikatakan memenuhi kriteria baik

Pembahasan

Pengaruh Pembangunan Fisik Terhadap BUMDes

Hipotesis yang pertama yaitu pembangunan fisik (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap BUMDes (Y_1), ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fisik (X_1) berpengaruh positif terhadap BUMDes (Y_1), tetapi tidak signifikan.

Ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara pembangunan fisik terhadap BUMDes ditolak. Dan ini juga memiliki arti bahwa pengelolaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan fisik walau tidak melalui BUMDes tidak ada masalah, karena keberadaan BUMDes dalam pengelolaan dana desa di bidang pembangunan fisik hanya memberikan pengaruh yang kecil. Dapat juga diartikan bahwa pembangunan fisik dapat dilakukan tanpa melalui BUMDes. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa BUMDes memiliki peran untuk meningkatkan PADesa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator, tetapi belum memberikan hasil seperti yang diinginkan, karena hanya memberikan peningkatan yang kecil. Anggraeni (2016) yang menyatakan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri dapat membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial, tetapi disisi lain keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahman (2015) yang membuktikan bahwa perekonomian masyarakat terjadi peningkatan pada masyarakat yang menggunakan dana BUMDes yang melakukan kegiatan dagang gorengan, menjual barang pecah belah, menjual barang-barang kelontong, perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa.

Pengaruh Program Pemberdayaan Terhadap BUMDes

Hipotesis yang kedua yaitu program pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap BUMDES, diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap BUMDes. Ini berarti bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh BUMDes untuk program pemberdayaan tepat sasaran dan sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Dan BUMDes memiliki peran yang penting

dalam pengelolaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lalira *et al.*, (2018), yang menyatakan bahwa dana desa dan pengalokasian tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Anggraeni (2016) yang menyatakan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri dapat membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial, tetapi disisi lain keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung. Rahman (2015) yang membuktikan bahwa perekonomian masyarakat terjadi peningkatan pada masyarakat yang menggunakan dana BUMDes yang melakukan kegiatan dagang gorengan, menjual barang pecah belah, menjual barang-barang kelontong, perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Caya dan Rahayu (2019), yang menyatakan bahwa BUMDes memberikan dampak pada perekonomian desa, pengembangan usaha masyarakat desa dan memotivasi masyarakat desa untuk memulai usaha baru. Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa BUMDes memiliki peran untuk meningkatkan PADesa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator, tetapi belum memberikan hasil seperti yang diinginkan, karena hanya memberikan peningkatan yang kecil.

Pengaruh BUMDes Terhadap Pendapatan Masyarakat

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara BUMDes terhadap pendapatan masyarakat, diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat secara positif dan signifikan. Ini berarti bahwa keberadaan BUMDes dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya BUMDes, masyarakat merasa sangat dibantu dalam peningkatan pendapatan. Karena BUMDes ini juga

memberikan bantuan kredit kepada masyarakat untuk digunakan sebagai modal usaha dalam jangka yang panjang dan bunga lunak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa BUMDes memiliki peran untuk meningkatkan PADesa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator, tetapi belum memberikan hasil seperti yang diinginkan, karena hanya memberikan peningkatan yang kecil; Anggraeni (2016) yang menyatakan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri dapat membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial, tetapi disisi lain keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung; Rahman (2015) yang membuktikan bahwa perekonomian masyarakat terjadi peningkatan pada masyarakat yang menggunakan dana BUMDes yang melakukan kegiatan dagang gorengan, menjual barang pecah belah, menjual barang-barang kelontong, perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Boonperm *et al.*, (2013) yang menyatakan bahwa VF pinjaman adalah terkait dengan perolehan barang yang lebih tahan lama, dengan cara yang berlawanan, peminjaman dari Bank untuk sektor pertanian dan koperasi Pertanian, memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pendapatan daripada terhadap pengeluaran. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lalira *et al.*, (2018), yang menyatakan bahwa dana desa dan pengalokasian tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Purnamasari *et al.*, (2016) menyatakan bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti melihat bahwa pencapaian tujuan dalam efektifitas pengelolaan BUMDes berbasis ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Hal ini yang menyebabkan peran BUMDes dalam peningkatan pendapatan masyarakat dikatakan masih kecil.

Pengaruh Pembangunan Fisik Terhadap Pendapatan Masyarakat

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat ditolak, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat, tetapi tidak signifikan. Ini juga dapat diartikan bahwa dana desa yang digunakan untuk pembangunan fisik tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Atmojo *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa penggunaan alokasi dana desa efektif untuk mengembangkan potensi ekonomi. Caya dan Rahayu (2019) yang membuktikan bahwa BUMDes memberikan dampak pada perekonomian desa, pengembangan usaha masyarakat desa dan memotivasi masyarakat desa untuk memulai usaha baru. Jika perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, maka dana desa akan sesuai dengan sasaran dan target yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Karena pengelolaan dana desa, masih menjadi dominasi pemerintahan desa, maka hasil pembangunan fisik belum mampu untuk mendongkrak pendapatan masyarakat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa BUMDes memiliki peran untuk meningkatkan PADesa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator, tetapi belum memberikan hasil seperti yang diinginkan, karena hanya memberikan peningkatan yang kecil dan Boonperm *et al.*, (2013) yang menyatakan bahwa VF pinjaman adalah terkait dengan perolehan barang yang lebih tahan lama, dengan cara yang berlawanan, peminjaman dari Bank untuk sektor pertanian dan koperasi Pertanian, memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pendapatan daripada terhadap pengeluaran. Fanani, (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa.

Pengaruh Program Pemberdayaan Terhadap Pendapatan Masyarakat

Hipotesis kelima menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara program pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat, ditolak, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara program pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat, tetapi tidak signifikan. Ini berarti bahwa program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan selama ini belum menyentuh masyarakat secara langsung, dan belum dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat, ini dibuktikan dengan pendapatan masyarakat yang masih tetap atau belum mengalami perubahan walaupun sudah ada program pemberdayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman (2015) yang membuktikan bahwa perekonomian masyarakat terjadi peningkatan pada masyarakat yang menggunakan dana BUMDes yang melakukan kegiatan dagang gorengan, menjual barang pecah belah, menjual barang-barang kelontong, perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa BUMDes memiliki peran untuk meningkatkan PADesa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisator, tetapi belum memberikan hasil seperti yang diinginkan, karena hanya memberikan peningkatan yang kecil; Anggraeni (2016) yang menyatakan bahwa keberadaan BUMDes tidak dipungkiri dapat membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial, tetapi disisi lain keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung. Boonperm *et al.*, (2013) yang menyatakan bahwa VF pinjaman adalah terkait dengan perolehan barang yang lebih tahan lama, dengan cara yang berlawanan, peminjaman dari Bank untuk sektor pertanian dan koperasi Pertanian, memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pendapatan daripada terhadap pengeluaran. Atmojo *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa penggunaan alokasi dana desa efektif untuk mengem-

bangkan potensi ekonomi. Selain itu, juga perlu menyediakan pelatihan khusus untuk kegiatan masyarakat dalam rangka mendorong tumbuhnya potensi ekonomi. Jika potensi ekonomi tumbuh, maka akan menyebabkan pendapatan masyarakat akan meningkat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Caya dan Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa BUMDes memberikan dampak pada perekonomian desa, pengembangan usaha masyarakat desa dan memotivasi masyarakat desa untuk memulai usaha baru.

Purnamasari *et al.*, (2016) menyatakan bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti melihat bahwa pencapaian tujuan dalam efektifitas pengelolaan BUMDes berbasis ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Hal ini yang menyebabkan peran BUMDes dalam peningkatan pendapatan masyarakat dikatakan masih kecil. Program pemberdayaan masyarakat desa, masih sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya program pemberdayaan masyarakat desa akan dapat mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja secara mandiri. Pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki perumusan yang tepat tentang pengalokasian dana desa yang digunakan untuk program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan adanya program pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan pembangunan fisik, sedangkan pengalokasian dana desa selama ini yang terjadi hampir 70% digunakan untuk pembangunan fisik sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat hanya kurang lebihnya 30%. Semakin berhasil pelaksanaan program pemberdayaan, yang diwujudkan dengan semakin banyak masyarakat yang memiliki usaha mandiri, maka akan semakin meningkat pendapatan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, tidak ada pengaruh antara pembangunan fisik terhadap BUMDes. Kedua, ada pengaruh antara program pemberdayaan terhadap BUMDes. Ketiga, ada pengaruh antara BUMDes terhadap pendapatan masyarakat. Keempat, tidak ada pengaruh antara pembangunan fisik terhadap pendapatan masyarakat. Kelima, ada pengaruh antara program pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik tidak perlu melalui BUMDes, karena peran BUMDes dalam pembangunan fisik sangat kecil. Selain itu pembangunan fisik juga tidak memiliki pengaruh dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Ada atau tidak adanya pembangunan fisik tidak akan dapat mempengaruhi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya dalam pengalokasian dana desa yang digunakan untuk pembangunan fisik sedianya dikurangi jumlahnya dan dialihkan pada program pemberdayaan masyarakat.

Peran BUMDes sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, misalnya dalam membentuk dan menumbuhkan usaha mandiri masyarakat melalui pengelolaan dana desa oleh BUMDes. Pengelolaan dana desa yang tepat yang dilakukan oleh BUMDes akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan, dengan adanya BUMDes, aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pemberdayaan bisa dipenuhi. Jika pemberdayaan masyarakat berhasil, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Saran

Mendasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan sebagai berikut: pertama, pe-

rencanaan penganggaran untuk pengalokasian dana desa disarankan untuk melibatkan masyarakat. Kedua, Pengelolaan dana desa harus terencana, transparan, dan akuntabel serta menggunakan standart akuntansi pemerintahan. Ketiga, BUMDes diberikan wewenang untuk mengelola dana desa. Keempat, BUMDes harus dikelola oleh manajemen yang profesional dalam pengelolaan dana desa. Kelima, merencanakan penggunaan dana desa yang tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan membuka lowongan kerja dan lowongan berusaha. Keenam, memberikan pelatihan kepada SDM BUMDes.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah pertama, data yang digunakan hanya data primer karena data sekunder terbatas atau masih belum bisa diakses secara keseluruhannya, khususnya untuk perhitungan AD, AA dan AF. Kedua, ruang lingkup penelitian hanya satu desa, sehingga hasil penelitian belum bisa digeneralisasikan untuk seluruh desa. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan satu BUMDes, karena dari 9 (sembilan) BUMDes yang ada di kecamatan tersebut hanya satu BUMDes yang produktif dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., F. Arianti, E. W. Kushartono, dan D. Darwanto. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13(1): 67-81.
- Anggraeni, M. R. R. S. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus* 28(2): 155-167.
- Arikunto, S. 2010. Metode Penelitian Bumi Aksara. Jakarta.
- Atmojo, M. E., H. D. Fridayani, A. N. Kasiwi, dan M. A. Pratama. 2017. Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi

- ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARISTO* 5(1): 126-140.
- Boonperm, J., J. Haughton, dan S. R. Khandker. 2013. Does the Village Fund matter in Thailand? Evaluating the impact on incomes and spending. *Journal of Asian Economics* 25: 3-16.
- Budiono, P. 2015. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda* 4(1): 116-125.
- Caya, F. M. N. dan E. Rahayu. 2019. Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20(1): 1-12.
- Chikmawati, Z. 2019. Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro* 5(1): 101-113.
- Denhardt, R. B. 2000. The New Public Service: Serving Rather than Steering. *Public Administration Review* 60(6): 549-559.
- Fanani, Z. 2019. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Penganggaran Dan Pendapatan Asli Desa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 2(3): 385-403.
- Hardijono, R., Y. A. Maryunani, dan C. F. Ananda. 2014. Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *IOSR Journal of Economics and Finance* 3(2): 21-30.
- Harmiati, A. A. Z. dan A. A. Zulkhakim. 2018. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Unihaz Bengkulu, Cluster Ekonomi, Setnas ASEAN*: 1-12.
- Hendrik. 2011. Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar Dan Danau Bawah di Kecamatan DAYUN Kabupaten SIAK Provinsi RIAU. *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 16(1): 21-32.
- Hood, C. 1991. A Public Management for all Seasons?. *Public Administration* 69(1): 3-19.
- Irawati, D. dan D. E. Martanti. 2018. Transparasi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *UNEJ e-Proceeding*, 2017: 41-51.
- Kementerian Keuangan. 2015. Permenkeu No 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan Pemanfaatan Evaluasi Dana Desa. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Kurniawan, A. E. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Lalira, D., A. T. Nakoko, dan I. P. F. Rorong. 2018. Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18(4): 62-72.
- Modigliani, F. dan M. H. Miller. 1958. The Cost of Capital, Corporation Finance and The Theory of Investment. *British Medical Journal* 48(3): 261-297.
- Nugrahaningsih, P. dan J. Winarna. 2016. Pendampingan Pengelolaan Dana Desa dengan Pengembangan BUMDes Berbasis Sistem Informasi Akuntansi. *Prosiding SNAMK (Seminar Nasional Akuntansi Manajemen dan Keuangan)*: 121-128.
- Pertiwi, P. 2015. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan, Tenaga Kerja Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

- Purnamasari, H., E. Yulyana, dan R. Ramdani. 2016. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana* 1(2): 31-42.
- Putra, A. S. 2015. *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Rahman, A. 2015. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi* 2(1): 1-19.
- Ramadana, C. B. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1(6): 1068-1076.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Sidik, F. 2015. Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 19(2): 115-131.
- Sofiyanto, M., R. M. Mardani, dan M. A. Salim. 2017. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen* 6(04): 124-135.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Alfabeta. Bandung.